

MANUSIA SUSILA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FILOSOFIS

*Surajiyo**

Pendahuluan

Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Semua kegiatan dan kehidupan negara dan bangsa harus didasarkan pada Pancasila. Di samping sebagai dasar, Pancasila juga merupakan pedoman yang menunjukkan arah dalam mencapai tujuan negara.

Pendidikan, selain merupakan kegiatan dalam keluarga, masyarakat dan negara, secara logis Pancasila merupakan dasar dan sekaligus pedoman yang menunjukkan ke mana tujuan pendidikan nasional itu diarahkan.

Penjabaran lebih konkret dan operasional dari Pancasila terdapat dalam UUD 1945 dan peraturan perundangan yang ada di bawahnya. Dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 dinyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Ayat 2 berbunyi pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Operasional lebih lanjut tentang pendidikan diatur dengan undang-undang. UU RI No. 4 Tahun 1950 mengatur tentang Dasar-Dasar Pendidikan Pengajaran di Sekolah, diperkuat dengan Lembaran Negara No. 38/1950, dan diperkuat UU No. 12/1954. Bab II Pasal 3 berisi tentang tujuan pendidikan yaitu membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air.

Dalam UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan nasional berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berda-

sarkan Pancasila dan UUD 1945; berfungsi mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional.

Dalam Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 disebutkan dalam Bab II, Kondisi Umum, bahwa di bidang pendidikan, masalah yang dihadapi adalah berlangsungnya pendidikan yang kurang bermakna bagi pengembangan pribadi dan watak peserta didik, yang berakibat hilangnya kepribadian dan kesadaran akan makna hakiki kehidupan. Mata-pelajaran yang berorientasi pada akhlak dan moralitas serta pendidikan agama kurang diberikan dalam bentuk latihan-latihan pengalaman untuk menjadi corak kehidupan sehari-hari. Karenanya, masyarakat cenderung tidak memiliki kepekaan yang cukup untuk membangun toleransi, kebersamaan, khususnya dengan menyadari keberadaan masyarakat yang majemuk.

Seiring dengan kondisi umum tersebut, visi yang tertuang dalam Bab III adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera, dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia, yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi, dan berdisiplin.

Misi yang berkaitan dengan bidang pendidikan adalah perwujudan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia,

Doktorandus, Staf Pengajar IISIP, Jakarta

kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin dan bertanggung jawab, berketerampilan, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia.

Berangkat dari penilaian baik buruk atas perbuatan seseorang, hal itu selalu dihubungkan dengan pilihan yang mendapat petunjuk atau penerangan dari budinya. Karena budinya, manusia memiliki daya tahu dan karena kehendaknya, memiliki daya pilih. Adanya daya tahu dan daya pilih itu mengakibatkan manusia berbeda dengan makhluk lain. Daya tahu dan daya pilih merupakan dasar kemanusiaan. Oleh karena itu, manusia susila adalah seseorang yang berbuat dengan senantiasa memilih yang baik sesuai dengan penerangan budinya. (Parmono, 1983)

Merujuk kepada pengertian manusia susila, berarti bahwa manusia yang selalu bertingkah laku baik sesuai dengan budinya memiliki budi pekerti yang luhur. Ia menerapkan nilai-nilai yang baik di dalam setiap perbuatannya. Manusia yang demikian itu mempunyai kepribadian. Artinya, ia berbuat semata-mata karena keyakinannya bahwa perbuatannya itu baik. Perbuatannya itu bukan karena orang lain, bukan pula karena kedudukannya. Seandainya berbuat karena orang lain, justru ia akan kehilangan kepribadiannya. Ia bertanggung jawab kepada kata hatinya. Ia pun bertanggung jawab kepada siapa pun yang berhak menuntut jawab yang sah atas perbuatannya. Ia berkepribadian. Artinya satu-satunya pedoman bagi tingkah lakunya ialah keyakinannya bahwa perbuatannya itu baik. Dengan demikian, ia tidak terombang-ambing oleh keadaan apa pun di dalam pendiriannya.

Kebaikan merupakan sesuatu yang karena kebaikan itu adalah tujuan, dikehendaki untuk dicapai. Plato, filsuf Yunani Kuno, berpendapat bahwa cita (*ide*) yang tertinggi adalah cita (*ide*) tentang kebaikan. Hal itu mengandung pengertian bahwa kualitas seseorang itu bisa dinilai dengan ukuran perbuatan baik. Apabila manusia itu dengan kehendaknya menginginkan kebaikan di dalam perbuatannya, itu berarti bahwa ia akan kembali kepada kodrat (*fitrah*)nya sebagai makhluk yang semula memang baik. Dengan kata lain, manusia

susila merupakan perkembangan dari fitrah manusia sendiri.

Dengan latar belakang tersebut maka timbul masalah apakah makna hakikat manusia susila, khususnya manusia Indonesia yang berdasarkan Pancasila? Untuk menjawab persoalan ini, pembahasan sangat erat dengan tinjauan filsafati, yaitu mulai dari etika, moral, norma, arti kesusilaan, dasar perbuatan susila, kriteria perbuatan susila, rintangan-rintangan perbuatan susila, dan pengaruh tujuan yang baik terhadap perbuatan susila.

Antara Etika, Moral, Norma, dan Arti kesusilaan

Secara etimologi etika berasal dari kata Yunani *ethos* yang berarti watak kesusilaan atau adat. Secara terminologi etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik-buruk.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika dijelaskan dengan membedakan tiga arti, yaitu:

- 1) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak);
- 2) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; dan
- 3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Istilah yang hampir sama dengan etika adalah etiket. Antara etika dan etiket ada persamaan dan ada perbedaan. Persamaannya adalah pertama etika dan etiket menyangkut perilaku manusia. Hewan tidak mengenal etika ataupun etiket. Kedua, baik etika maupun etiket mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberikan norma bagi perilaku manusia dan dengan demikian menyatakan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan.

Perbedaan yang sangat penting antara etika dan etiket adalah sebagai berikut.

1. Etiket menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia. Misalnya, jika saya menyerahkannya sesuatu kepada atasan, saya harus menyerahkannya dengan menggunakan tangan kanan. Dianggap melanggar etiket bila orang menyerahkan sesuatu dengan tangan

kiri. Akan tetapi, etika tidak terbatas pada cara dilakukannya suatu perbuatan. Etika memberikan norma tentang perbuatan itu sendiri. Etika menyangkut masalah apakah suatu perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak.

2. Etiket bersifat relatif. Yang dianggap tidak sopan dalam satu kebudayaan bisa saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Etika jauh lebih absolut. "Jangan mencuri", "jangan berbohong", "jangan membunuh" merupakan prinsip-prinsip etika yang tidak bisa ditawar-tawar. (Bertens, 1993).

Sunoto (1982) berpendapat bahwa etika dapat dibagi menjadi etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif hanya melukiskan, menggambarkan, dan menceritakan apa adanya, tidak memberikan penilaian, tidak mengajarkan bagaimana seharusnya berbuat: contohnya adalah sejarah etika. Etika normatif sudah memberikan penilaian yang baik dan yang buruk, yang harus dikerjakan dan yang tidak. Etika normatif dapat dibagi menjadi etika umum dan etika khusus. Etika umum membicarakan prinsip-prinsip umum, seperti apakah nilai, motivasi suatu perbuatan, suara hati, dan sebagainya. Etika khusus adalah pelaksanaan prinsip-prinsip umum, seperti etika pergaulan, etika dalam pekerjaan, dan sebagainya.

Moral berasal dari kata latin *mos*, jamaknya *mores* yang berarti adat atau cara hidup. Etika dan moral sama artinya, tetapi dalam penilaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Moral dan moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai yang ada.

Suseno (1987) membedakan ajaran moral dan etika. Ajaran moral adalah ajaran-ajaran, wejangan-wejangan, khotbah-khotbah, peraturan-peraturan lisan atau tulisan tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik. Sumber langsung ajaran moral adalah pelbagai orang dalam kedudukan yang berwenang, seperti orang tua dan guru, para pemuka masyarakat dan agama, dan tulisan para bijak. Etika bukan sumber tambahan bagi ajaran moral, tetapi merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan

mendasar tentang ajaran dan pandangan moral. Etika adalah sebuah ilmu dan bukan sebuah ajaran. Jadi, etika dan ajaran moral tidak berada di tingkat yang sama. Yang mengatakan bagaimana kita harus hidup bukan etika, melainkan ajaran moral. Etika mau mengerti mengapa kita harus mengikuti ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita dapat mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan pelbagai ajaran moral.

Semula norma diartikan sebagai alat tukang kayu atau tukang batu yang berupa segitiga. Norma berarti pula sebuah ukuran. Pada perkembangannya, norma diartikan garis pengarah atau suatu peraturan. Misalnya, dalam suatu masyarakat pasti berlaku norma umum yaitu norma sopan santun, norma hukum, dan norma moral. Dari ketiga norma ini, norma moralah yang paling berbobot karena norma moral adalah tolok-ukur yang dipakai masyarakat untuk mengukur kebaikan seseorang. Kata moral selalu mengacu pada baik-buruknya manusia sebagai manusia. Bidang moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari segi kebajikannya sebagai manusia. Norma moral adalah tolok ukur untuk menentukan betul-salahnya sikap dan tindakan manusia dilihat dari segi baik-buruknya sebagai manusia dan bukan sebagai pelaku peran tertentu dan terbatas.

Arti Kesusilaan

Leibniz, filsuf zaman modern, berpendapat bahwa kesusilaan adalah hasil suatu "menjadi", yang terjadi di dalam jiwa. "Menjadi" karena perkembangan usaha jiwa terjadi bersamaan dengan perkembangan gagasan-gagasan, sedemikian rupa sehingga usaha itu dalam tingkatannya diikat oleh gagasan yang sesuai dengannya. "Menjadi" merupakan perkembangan dari nafsu alamiah yang gelap sampai kepada kehendak yang sadar, yang berarti sampai kepada kesadaran kesusilaan yang telah tumbuh lengkap karena aktivitas jiwa sendiri. Segala perbuatan dan kehendak kita sejak semula telah ada. Apa yang benar-benar kita kehendaki telah terkandung sebagai benih di dalam nafsu alamiah yang gelap. Oleh karena itu, tugas kesusilaan pertama-tama ialah meningkatkan perkem-

bangan itu dalam diri manusia sendiri. Kesusilaan hanya berkaitan dengan batin. Akibat pandangan itu ialah bahwa orang hanya dapat berbicara tentang kehendak yang baik dan jahat. Kehendak baik ialah jika perbuatan kehendak itu mewujudkan suatu bagian dari perkembangan yang sesuai dengan gagasan yang jelas dan aktual. Kehendak jahat ialah jika perbuatan kehendak diikat oleh gagasan yang tidak jelas (Hadiwijono, 1990)

Kata susila dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan menjadi dua hal, yakni (1) sopan, beradab, baik budi bahasanya; (2) kesusilaan ada dua hal yakni pertama kesopanan, sopan santun, keadaban dan kedua zaman adab. Bertolak dari pengertian itu, kesusilaan termasuk dalam lingkup etika, bukan hanya etiket.

Menurut Herbert Spencer, (Hadiwijono, 1990) pengertian kesusilaan yang berarti keadaban bisa berubah. Di antara bangsa-bangsa yang bermacam-macam dan pada zaman yang bermacam-macam itu, pengertian kesusilaan sama sekali berbeda-beda. Pada zaman negara militer, kebajikan keprajuritanlah yang dihormati, sedang pada zaman negara industri, hal itu dianggap hina. Hal ini disebabkan kemakmuran yang dialami pada zaman industri itu bukan didasarkan atas perampasan dan penaklukan, melainkan atas kekuatan berproduksi (Hadiwijono, 1990)

Fudyartanta (1974) memberi arti kesusilaan adalah keseluruhan nilai atau norma yang mengatur atau merupakan pedoman tingkah laku manusia di dalam masyarakat untuk menyelenggarakan tujuan hidupnya. Moral atau kesusilaan adalah keseluruhan norma atau nilai sosial yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat untuk selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang secara objektif dan hakiki baik.

Pengertian kesusilaan menurut Fudyartanta tersebut berbeda jika dibandingkan dengan pengertian kebudayaan. Kebudayaan berasal dari kata Sansekerta *buddha-yah*, yaitu bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, kebudayaan dapat diartikan hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Koentjaraningrat (1990) memberikan arti kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tin-

dakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.

Dari beberapa pengertian kesusilaan tersebut dapat dirumuskan bahwa kesusilaan yang berasal dari kata susila mendapat awalan ke- dan akhiran -an membentuk kata benda abstrak. Kesusilaan adalah sifatnya, berasal dari dalam, bukan dari luar. Artinya, kesusilaan ini dekat dengan keakuan.

Yang dapat dinilai dari baik buruk ialah sikap manusia yaitu yang menyangkut perbuatan, tingkah laku, gerakan-gerakan, kata-kata, dan sebagainya. Sebenarnya, objek penilaian itu tidak hanya perbuatan atau tingkah laku yang tampak, tetapi juga motif, bahkan lebih dalam lagi ialah watak atau perangai, suara hati. Dari hal tersebut, perbuatan atau tingkah lakulah yang mudah dinilai karena ucapan, motif, dan isi hati seseorang sukar diketahui. Tingkah laku yang dapat dinilai baik-buruknya hanyalah tingkah laku yang dikerjakan dengan kesadaran. Tentu saja, suatu perbuatan yang baik seharusnya sama dengan ucapan dan isi hatinya.

Dasar Perbuatan Susila

Kodrat manusia ialah bahwa dalam hidupnya manusia melakukan gerakan, aktivitas, dan perbuatan. Tidak mungkin manusia dapat hidup tanpa aktivitas, tanpa perbuatan, dan tanpa gerakan. Justru dengan berbuat secara konkret, barulah manusia mempunyai kemungkinan dapat mencapai tujuan hidupnya. Oleh karena itu, ada beberapa orang menunjukkan berbagai perbuatannya, entah mereka merasa gagal hidupnya atau merasa kosong di dalam hidupnya. Kehidupan manusia terdiri dari serangkaian perbuatan yang ada di bawah pengawasannya, dan dengan demikian dapat hidup layak dengan derajat manusia. Perbuatan-perbuatan demikian itu dinamai tingkah laku atau kelakuan. Jadi, tujuan hidup manusia itu adalah bertingkah laku sedemikian rupa sehingga dapat mencapai tujuan hidupnya, baik di dunia yang fana maupun di akhirat.

Tingkah laku itu terdiri dari serangkaian perbuatan kemanusiaan, dan bukan sekedar perbuatan yang semata-mata berasal

dari seorang manusia. Tingkah laku kemanusiaan itu dikuasai oleh manusia, yaitu oleh pengawasan-pengawasan yang sadar serta kemauan yang bebas atau merdeka. Oleh karenanya, manusia bertanggung jawab terhadap segala tingkah lakunya.

Ada tiga anasir yang dapat menyifati perbuatan kemanusiaan :

1. Pengetahuan yang memberikan penerangan akan tujuan dan cara untuk mencapainya.
2. Kerelaan kemauan yang menuntut bahwa manusia sebagai pelaksana mengetahui apa yang dikerjakan. Selain itu menuntut juga bahwa pelaksana mau mengerjakannya dan mau bertanggung jawab. Inilah pertanda perbuatan itu menjadi perbuatan kemanusiaan.
3. Kemerdekaan atau kebebasan perlu juga. Karena kebebasan, maka manusia dapat memilih sesuatu. Kebebasan untuk memilih selalu menyertai anasir-anasir tersebut. (Sunoto, 1982).

Dalam perbuatan susila, yang menjadi dasar pertama adalah kehendak yang pada hakikatnya adalah kodrat manusia. Kehendak itu merupakan dorongan dasar untuk berbuat dan untuk mengadakan kegiatan. Salah satu bentuk dari kehendak adalah kemauan, yaitu berupa kemauan bebas. Untuk dapat bersifat susila, kehendak itu harus baik. Jadi, kemauan itu harus baik pula.

Kriteria Perbuatan Susila

Dasar-dasar perbuatan yang menjadi kriteria perbuatan susila menurut Fudyartanta (1974) adalah kehendak yang baik, keputusan akal yang baik, dan penyesuaian dengan hakikat manusia. Kalau ketiganya telah dipenuhi dengan baik, perbuatan berdasarkan ketiga kriteria itu telah cukup untuk menentukan bahwa perbuatan itu betul-betul sudah susila.

Tujuan pendidikan di Indonesia yang terdapat dalam Ketetapan MPRS No. XVII/MPRS/1966 tentang agama, pendidikan, dan kebudayaan ialah membentuk manusia pancasilais sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh Pembukaan UUD 1945 dan isi UUD 1945. Dengan merujuk ketentuan tersebut,

kriteria manusia susila adalah kalau perbuatan-perbuatan manusia itu sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu sesuai dengan hakikat Tuhan, hakikat manusia, hakikat satu, hakikat rakyat, dan hakikat adil.

Sunoto (1982) berpendapat bahwa suatu perbuatan dapat diberi sifat sebagai perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral (Pancasila) ialah kalau tindakan tersebut sesuai dengan unsur-unsur ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Jika tidak sesuai, tindakan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara moral.

Rintangan-rintangan Perbuatan Susila

Rintangan-rintangan perbuatan susila dapat digolongkan atas dua macam.

1. Rintangan dari luar manusia, misalnya bahaya, paksaan, ancaman, dan sebagainya.
2. Rintangan dari dalam diri manusia, yang dapat dibagi atas dua bagian, yakni dasar jasmaniah dan dasar rokhaniah.

Rintangan dari luar yang tampaknya berat adalah rintangan ringan karena tampak. Misalnya, kalau melewati Jalan Solo, tentu orang melihat toko-toko yang beraneka ragam yang indah-indah. Ini merupakan rintangan rintangan yang ringan, Hanya masalahnya ialah apakah seseorang itu punya uang atau tidak. Sebaliknya, rintangan dari diri manusia atau rintangan dari dalam lebih berat. Yang lebih berat adalah melawan hawa nafsu. Sifat hawa nafsu ada di dalam diri manusia, maka hal ini disebut rintangan kodrati.

Pengaruh yang kuat dapat melumpuhkan kehendak untuk berbuat semestinya. Pengaruh itu dapat berupa bahaya atau paksaan. Keduanya dapat merupakan tekanan jiwa manusia sehingga dapat mematahkan kemauan baik dan dengan sendirinya memaksa untuk berbuat yang tidak baik. Pada manusia ada kodrat rasa takut pada paksaan, tekanan, dan manusia dapat bertindak karena tekanan/paksaan. Misalnya bila dalam keadaan terpaksa karena tekanan/paksaan musuh yang membahayakan diri seseorang (misalnya akan ditembak

mati), terpaksa orang itu menunjukkan mar-kasnya.

Pengaruh Tujuan yang Baik terhadap Perbuatan Manusia Susila

Tiap-tiap perbuatan mempunyai tujuan dan tiap-tiap tujuan akan mempengaruhi perbuatan. Pengaruh tujuan baik terhadap perbuatan ialah tujuan yang baik mendorong perbuatan manusia (pendorong kehendak manusia). Tujuan baik mendorong perbuatan baik dan selanjutnya mendorong keputusan akal yang baik. Akan tetapi, hal ini tidak selalu demikian itu. Hal itu terjadi hanya pada umumnya. Ada tujuan yang kurang baik dapat menutup perbuatan susila, sedangkan tujuan baik belum tentu menjamin perbuatan susila, tetapi menjadi pendorongnya. Tujuan yang tidak baik, bagaimanapun jalan pelaksanaannya, tidak dapat dibenarkan oleh perbuatan susila.

Perbuatan dapat dikatakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Jadi, kalau tujuannya baik, seharusnya sarannya harus baik. Andaikan ditempuh dengan jalan yang tidak baik, tetapi bisa bahagia, tentu saja kebahagiaan itu hanya kebahagiaan semu, tidak utuh. Artinya, mungkin merupakan kebahagiaan lahir, kebahagiaan duniawi semata-mata sebab ada yang tidak bisa dibohongi dengan cara bagaimanapun juga, yaitu Allah dan dirinya sendiri. Artinya, Allah adalah maha mengetahui dan dirinya adalah pelaku sehingga tidak mungkin bisa dibohongi. Kebahagiaan yang sesungguhnya sebagai tujuan hidup manusia hanya dapat dicapai dengan sarana yang baik.

Tujuan juga berhubungan erat dengan *dasar*. Dasar adalah sesuatu yang bersifat tetap, suatu ajaran yang menjadi pedoman dalam melakukan perbuatan. Dasar yang terdapat pada diri manusia adalah baik. Hal ini relevan dengan teori *tabula rasa* John Locke bahwa manusia dilahirkan bagaikan kertas putih yang belum ada tulisannya. Baik-buruknya manusia tergantung pada tulisan semasa hidupnya. Hal ini berarti bahwa manusia lahir dalam keadaan suci, dalam keadaan baik. Untuk itu, seharusnya tujuan manusia itu baik, sarannya pun harus baik pula.

Jadi : dasar - sarana - tujuan
 baik baik baik

Pendidikan bukan merupakan tujuan, tetapi sarana, yaitu sarana untuk membentuk manusia susila. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Tujuannya adalah mencapai masyarakat Pancasila, termasuk manusia susila. Salah satu sarana untuk mencapai masyarakat Pancasila adalah melalui pendidikan. Jadi, pendidikan sebagai sarana harus baik, artinya pendidikan harus bisa dipertanggungjawabkan secara moral. Untuk itu, pendidikan yang tidak baik, misalnya mendidik agar manusia menjadi pencuri, pencopet, atau penjahat yang hebat tidak bisa dipertanggungjawabkan secara moral.

Kesimpulan

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada dasarnya kesusilaan menyangkut tingkah laku dan nilai manusia. Leibniz menekankan pada jiwa, batin manusia itu sendiri. Herbert Spencer memberikan pandangan yang lebih luas yang menyangkut negara, tetapi pada hakikatnya juga menyangkut diri pribadi. Drijarkara memberikan perumusan yang menyangkut nilai dan Fudyartanta menyangkut banyak pedoman kepada tingkah laku. Semuanya dapat diberi sifat yaitu dari dalam, dekat dengan keakuan sehingga yang menjadi objek penilaian susila adalah perbuatan manusia yang dilakukan dengan sadar.
2. Yang menjadi dasar dari perbuatan susila adalah kehendak yang pada hakikatnya merupakan kodrat manusia. Kehendak itu merupakan dorongan dasar untuk berbuat, untuk mengadakan kegiatan. Salah satu bentuk dari kehendak adalah kemauan, yaitu berupa kemauan bebas. Untuk dapat bersifat susila, kehendak itu harus baik. Jadi, kemauan itu harus baik pula.
3. Kriteria perbuatan susila adalah kehendak yang baik, keputusan akal yang baik, dan penyesuaian dengan hakikat manusia. Sesuai dengan tujuan pendidikan maka kriteria perbuatan susila adalah perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Bertens. 1993. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fudyartanta. 1974. *Etika*. Cetakan IV. Yogyakarta: Warawidnyani.
- Suseno, Franz Magnis. 1987. *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- . Dkk. 1991. *Etika Sosial Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hadiwijono. Harun. 1990. *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*. Cetakan VI. Yogyakarta : Kanisius.
- Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Cetakan VIII. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ketetapan-Ketetapan MPR RI Hasil Sidang Umum MPR RI Tahun 1999, Bina Pustaka Tama, Surabaya, 1999.
- Parmono, R. 1983 "Manusia Susila Merupakan Perkembangan Fitrah Manusia Sendiri", dalam *Beberapa Pemikiran Kefilsafatan*, Fakultas Filsafat UGM, Yogyakarta.
- Natawidjaja, Rochman (Editor). 1981. *Ilmu Keguruan Pendidikan Nasional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*.
- Sunoto. 1982. *Bunga Rampai Filsafat*, Cetakan I. Yayasan Pembinaan Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,
- . 1983. *Mengenal Filsafat Pancasila*. Seri Ketiga Cetakan III. Yogyakarta: UII.